



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MURTUTY NINGSIH
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
3. NHK : 728148

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **335.140.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 418 m2/300 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 75.240.000
2. Tanah Seluas 1205 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 30.125.000
3. Tanah Seluas 115 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , WARISAN Rp. 19.550.000
4. Tanah Seluas 2009 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 50.225.000
5. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **130.250.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG SSX MINIBUS Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA FIT SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.250.000
3. MOTOR, YAMAHA BYSON SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
4. MOTOR, HONDA GL PRO SEPEDA MOTOR Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
5. MOBIL, DAIHATSU AYLA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	50.655.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	209.334.072
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	725.379.072
III. HUTANG	Rp.	75.066.084
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	650.312.988

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRI NURHAYATI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI KURIKULUM, PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
3. NHK : 736337

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 80.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 504 m2/300 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 80.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 20.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 750.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 400.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 101.150.000

III. HUTANG Rp. 7.500.000

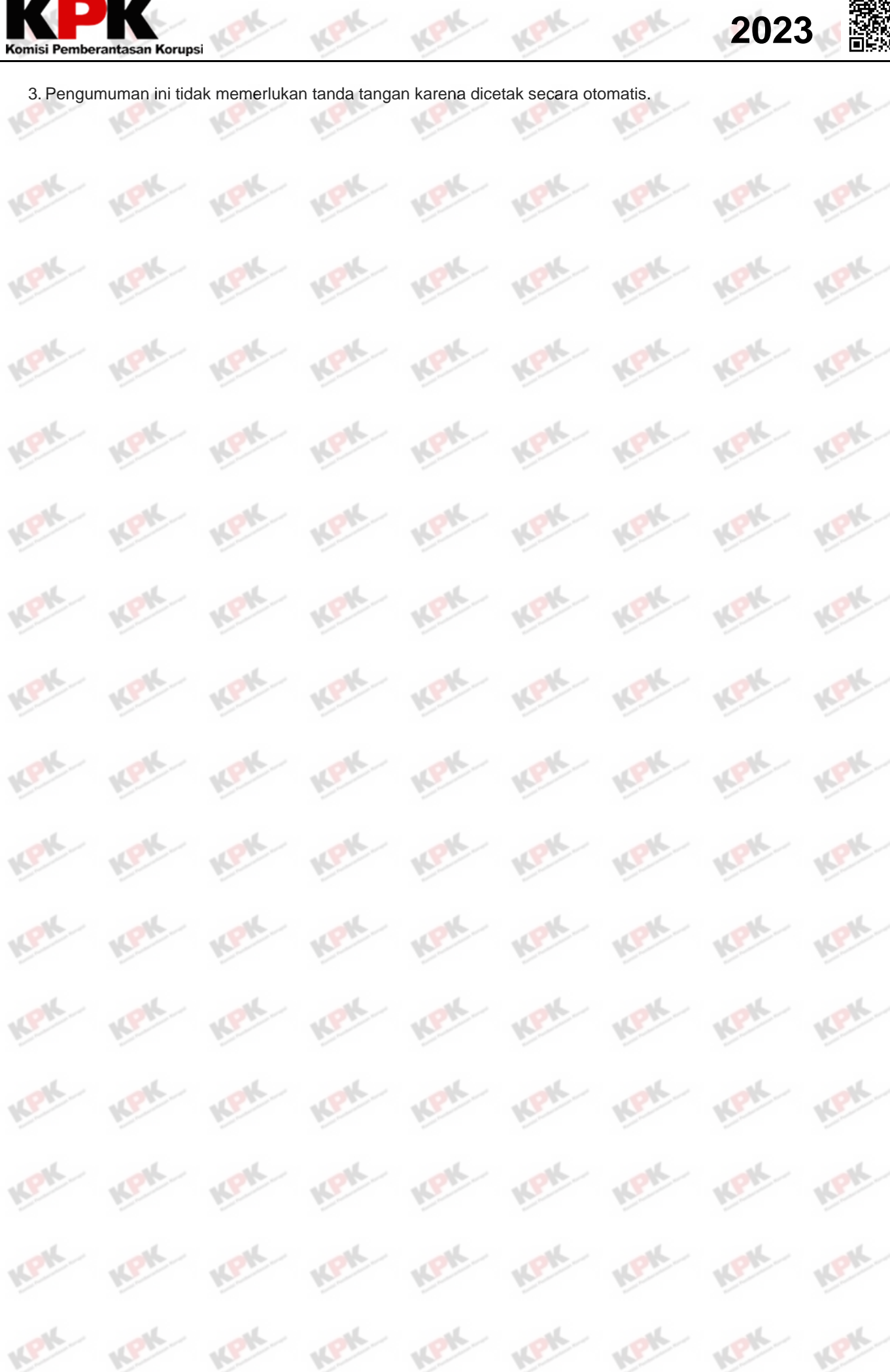
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 93.650.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JATI WIBOWO
2. Jabatan : KEPALA SEKSI OLAH RAGA
3. NHK : 736952

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	145.000.000
1. Tanah Seluas 350 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000		
2. Tanah Seluas 134 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 70.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	18.000.000
1. MOTOR, HONDA BLADE Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
2. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	125.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	289.000.000
III. HUTANG	Rp.	195.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	94.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRI SUMARYONO
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
3. NHK : 766047

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 550.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 476 m2/230 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 4320 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 111.500.000

1. MOBIL, TOYOTA MPV Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA ASTREA / C100 Tahun 1998, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 666.000.000

III. HUTANG Rp. 130.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 536.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

I. DATA PRIBADI

- Nama : SAKSANA ARIFIYANTO
- Jabatan : KEPALA SEKSI KEPEMUDAAN
- NHK : 771493

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 260.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 118 m²/70 m² di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 44.000.000

- MOBIL, SUZUKI BALENO SEDAN Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
- MOTOR, YAMAHA MIO SKUTER MATIC Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.420.678

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 305.420.678

III. HUTANG Rp. 230.000.000

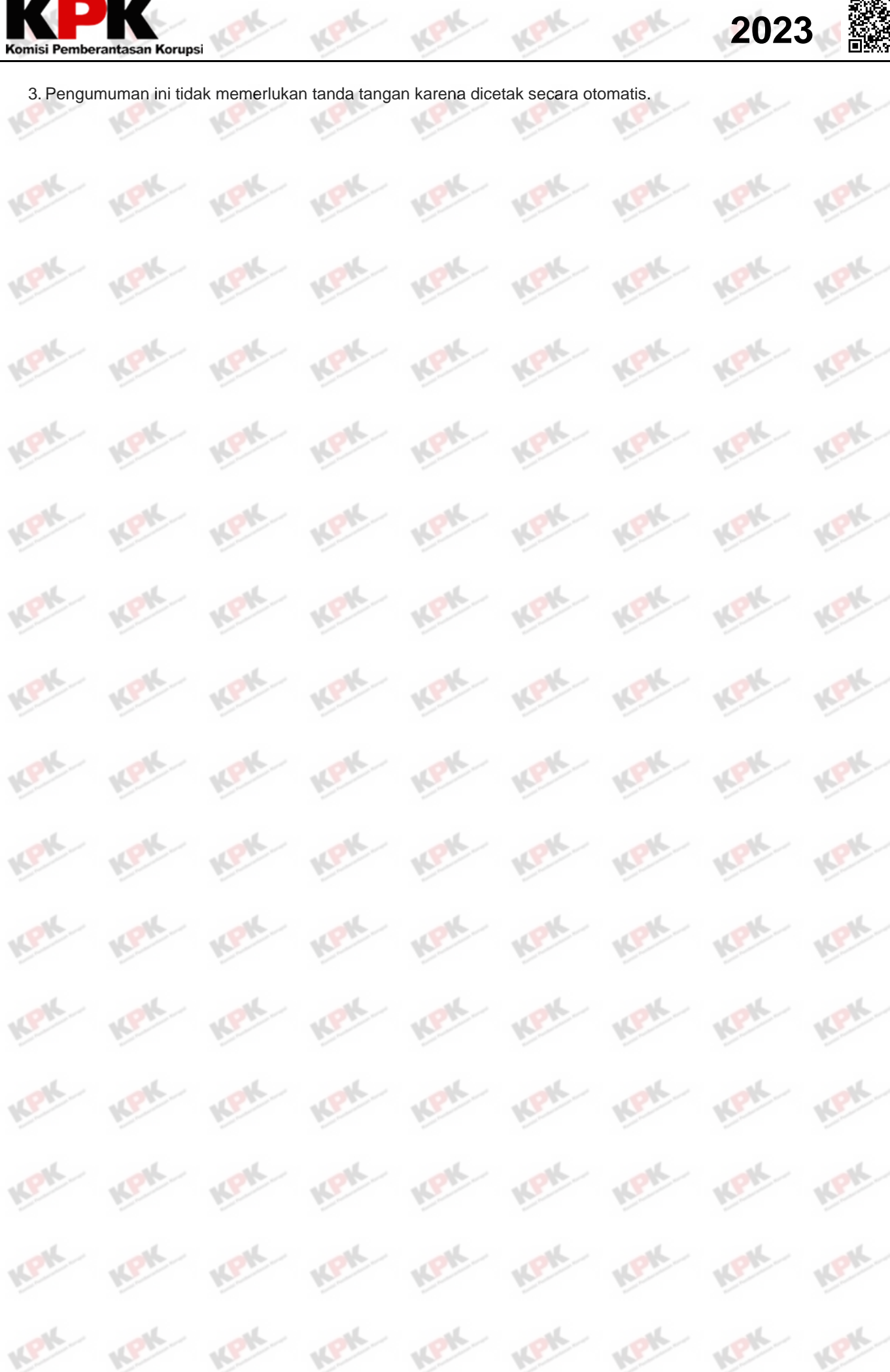
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 75.420.678

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DWI SULISTYOWATI
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 840783

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	119.000.000
1. MOTOR, MIO 0 Tahun 2014, HADIAH Rp. 5.000.000		
2. MOTOR, LEXI YAMAHA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000		
3. MOBIL, BRIO HONDA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	8.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	36.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	163.000.000

III. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	163.000.000
--	-----	-------------

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2024/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

I. DATA PRIBADI

- Nama : ISRO HENDAR SAPUTRA
- Jabatan : KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN KESISWAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
- NHK : 981729

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 700.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 240 m²/120 m² di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 36.000.000

- MOTOR, HONDA VIJ02050L1 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 36.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 100.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 836.000.000

III. HUTANG Rp. 109.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 727.000.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.